



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

Tahun Sidang : 2012 -2013
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 17 September 2012
Pukul : 14.00 WIB s.d 20.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua : Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris : Dra. Dewi Barliana, M.Psi
Hadir Anggota : 35 dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI
orang izin
Hadir Pemerintah : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI beserta
jajarannya.
Acara : " Pelaksanaan Fungsi Anggaran"
Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi
Listrik dalam RUU APBN T.A. 2013.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI terkait pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Anggaran, khususnya Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RAPBN Tahun Anggaran 2013.
3. Menteri ESDM RI menyatakan bahwa ;
 - a. Losses telah diupayakan terjadi penurunan dari 9% ditahun 2012 menjadi 8,5% ditahun 2013, dan hal ini akan terus kami lakukan akan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.
 - b. Konsumen dengan 450-900 VA tidak dikenakan kenaikan, dan akan dikenakan kenaikan 15% diatas rentang kelompok tarif 450-900 VA.

AS

c. Ada target pelanggan baru pada tahun 2013 sejumlah 2.952.651 dengan rincian umum untuk wilayah Indonesia Barat, Jawa Bali, dan wilayah Indonesia Timur masing-masing sejumlah 742.136 pelanggan, 1.268.432 pelanggan dan 942.082 pelanggan.

4. Wakil Menteri ESDM RI menyatakan bahwa

- a. BPP itu dipengaruhi oleh Pembelian Listrik dan Sewa, Bahan Bakar dan Depresiasi dan lain-lain.
- b. Penjelasan Point a adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

URAIAN	SATUAN	2012 APBN-P	2013 RAPBN	PENJELASAN
Penjualan Tenaga Listrik	TWh	167.23	182.28	Dengan proyeksi pertumbuhan 9%, penjualan tenaga listrik naik dari 167.23 TWh menjadi 182.28 TWh
BPP	Triliun Rp	192.60	212.07	Kurs Rp. 9.300/USD dan ICP/Barrel
1. PEMBELIAN LISTRIK DAN SEWA	Triliun Rp	34	36.82	Meningkatnya pembelian menjadi 46.73 TWh semula 43.03 TWh
Pembelian Listrik	Triliun Rp	28.38	30.83	Sewa Pembangkit untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan mengurangi pemadaman listrik, yaitu naik dari 11.4 TWh (APBN-P 2012), menjadi 12.17 TWh
Sewa Pembangkit	Triliun Rp	5.62	5.99	Kenaikan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 9% dan kenaikan harga energi primer, meskipun volumen BBM turun dari semula 7.22 jt KL menjadi 5.67 jt KL
2. BIAYA BAHAN BAKAR	Triliun Rp	102.81	112.75	
3. DEPRESIASI, ADMIN dll	Triliun Rp	55.79	62.5	Optimalisasi keandalan dan efisiensi dengan selesainya pembangunan sarana ketenagalistrikan (Pembangkit, transmisi dan distribusi)
Pemeliharaan	Triliun Rp	13.98	17.24	peningkatan kompetensi dan penambahan pegawai baru
Pegawai	Triliun Rp	13.89	14.67	pengembangan sistem data terpusat untuk peningkatan pelayanan pelanggan
Administrasi	Triliun Rp	4.3	4.55	Tambahan aset dengan selesainya pembangunan sarana ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi)
Penyusutan	Triliun Rp	15.04	16.96	Mingkatnya pembayaran bunga pinjaman dengan selesainya pembangunan sarana ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi)
Bunga Pinjaman	Triliun Rp	8.58	9.08	

5. Direktur Utama PT. PLN (Persero)

- a. Utang PLN memang terus meningkat, secara umum dipengaruhi oleh order Investasi PPLN senilai Rp. 60 Triliun pertahun.
- b. Cash PLN hanya sekitar Rp. 10 Triliun dan pemerintah memberikan tambahan Rp. 9 Triliun. selebihnya PLN membutuhkan tambahan pembiayaan salah satunya dengan SLA, Government loan dan leasing, Bank Loan dan Medium Loan, Bond dalam negeri sejak tahun 1994 dan menjual Global Bond pada tahun 2006.
- c. Alokasi utang PT. PLN (Persero) ini sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan pembangkit.

AKZ

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI dapat menyetujui usulan dari pemerintah mengenai subsidi sektor kelistrikan sebesar Rp. 78,63 Triliun, dengan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA.
2. Komisi VII DPR RI meminta RAKER dengan Kementerian ESDM RI terkait agenda alokasi gas untuk kebutuhan Dalam Negeri (Pembangkit Listrik, Sektor Industri, Konversi BBM ke Gas, Lifting Minyak), selambat-lambatnya dilaksanakan sebelum APBN TA. 2013 ditetapkan.

Catatan :

A. Fraksi PDI Perjuangan belum dapat menerima usulan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan usul sebagai berikut :

1. Menunda kenaikan tarif tenaga listrik.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor : 30/AuditamaVII/PDPT/09/2011 Atas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sector hulu listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian ESDM.
3. Mengusulkan judulnya adalah kenaikan Tarif Tenaga Listrik bukan penyesuaian sesuai dengan nota keuangan APBN.
4. Definisi subsidi disesuaikan dengan Peraturan Nomor : 162/PMK.02/2007 tertanggal 17 Desember 2007.
5. Materi yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan hari ini dan akan diikutsertakan dalam pembahasan RUU APBN TA. 2013.



B. Fraksi PKS : Agar pemerintah memperhatikan golongan tarif 1300 VA sebagai kelompok yang dipertimbangkan tidak dikenakan penyesuaian tarif.

C. Fraksi PAN : Penyesuaian itu sudah tepat

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 20.45 WIB

Jakarta, 17 September 2012

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA,**


DRS. IR. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM